

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang telah menjalankan otonomi daerah, dimana daerah otonom tersebut merupakan sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah dengan tujuan untuk mengembangkan daerah serta isi pada daerah tersebut. Berdasarkan asas-asas dasar otonomi yang meliputi realisme, pemerataan, dan pragmatisme, maka asas-asas tersebut diyakini akan memperkuat aspek-aspek demokrasi, partisipatif, dan keadilan, sekaligus mengakui potensi dan keragaman daerah. Setiap kebijakan otonomi diyakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan umum rakyat. Sebagaimana dinyatakan sepanjang era reformasi, tujuan utama otonomi dan pembangunan nasional adalah kesejahteraan rakyat. Dengan mengutamakan proyek-proyek yang menjawab kebutuhan masyarakat luas di daerah terpencil, baik melalui strategi nilai maupun keunggulan, tujuan ini dapat tercapai. (Ariadi, 2021:1).

Kunci keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah adalah sumber daya keuangan daerah yang memadai untuk dijadikan pedoman dalam menetapkan otonomi daerah. Kemampuan perekonomian daerah dalam mendukung pemerintahannya dalam menjalankan amanatnya, menyelenggarakan pelayanan publik, dan membangun daerahnya (Firdausy, 2018:9). Istilah daerah mengacu pada rencana keuangan yang digunakan pemerintah daerah sebagai landasan pengembangan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Dengan memaksimalkan

potensi dan kuantitas sumber daya daerah, APBD meringankan kebutuhan masyarakat umum. (Faradilla, 2021:15).

Mempromosikan pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama pemerintahan daerah dan kota. Dengan mengevaluasi potensi dan kekuatan sumber daya, membina praktik pekerjaan yang baru dapat merugikan keberhasilan perusahaan lokal, pemerintah daerah dapat secara aktif berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan mencapai tujuan ini. Meskipun tidak terlalu signifikan, belanja modal akan meningkat seiring dengan ekspansi ekonomi (Mundiroh, 2019). Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa sepanjang periode waktu tertentu, penduduk telah memperoleh manfaat yang signifikan dari kegiatan ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa kegiatan ekonomi adalah proses mengidentifikasi aliran ketidakseimbangan faktor konsumen melalui faktor produksi. Diperkirakan bahwa ketika ekonomi berkembang, pendapatan masyarakat juga akan meningkat. (Rappana, 2017:7).

Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana yang berkelanjutan adalah belanja modal. Menurut Halim, belanja modal merupakan investasi yang memberikan manfaat bagi daerah dalam beberapa periode anggaran dan berpotensi meningkatkan kekayaan atau aset daerah. Akibatnya, pengeluaran rutin, seperti biaya pemeliharaan, diperlukan untuk memastikan umur panjang aset dan meningkatkan kualitasnya. (Sudaryo, 2017:129).

Dengan luas wilayah 50.503 km² dan jumlah penduduk 41,77 juta jiwa, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terluas di Pulau Jawa menurut survei

demografi tahun 2020. Oleh karena itu, banyaknya wilayah perkotaan di Jawa Timur bukanlah suatu malapetaka. Jawa Timur memiliki sejumlah industri, termasuk manufaktur, perdagangan, pertanian, perhotelan, dan kuliner, yang dapat mendukung perluasan ekonomi. Meski demikian, APBD Jawa Timur tahun 2021 mengindikasikan kenaikan nasional sebesar 102,84% dari target pendapatan sebesar Rp33,9 triliun menjadi Rp35,2 triliun hingga 31 Desember 2021, bahkan di tengah pandemi COVID-19. Provinsi Gorontalo menguasai 102,37%, sedangkan proporsi ketiga dipegang oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 101,89%. (Alamsyah, 2021).

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu oleh Pramudya (2021) “dalam penelitiannya menyatakan bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAK berpengaruh terhadap Belanja modal”.

Penelitian oleh Purnasari (2022) “dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara persial variabel PAD dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal, variabel DBH dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal”.

Penelitian oleh Wadira (2013) “dalam penelitiannya menyatakan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal”.

Tujuan pengalokasian dana untuk belanja modal adalah untuk meningkatkan layanan publik melalui pembangunan dan pemeliharaan gedung serta infrastruktur yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Untuk mencapai hasil yang berkualitas dan minimal meningkatkan PAD, Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Lumajang juga harus

lebih fokus dan mengembangkan sektor pertanian di bidang lain. Di antaranya, pengembangan layanan pertanian yang dibutuhkan petani namun belum sepenuhnya terlaksana, seperti pembangunan infrastruktur irigasi dan pertanian, serta peningkatan sosialisasi dan kerja sama antar petani, khususnya petani kecil. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Daerah di setiap sektor yang berpotensi menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah harus terus dilakukan. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi ekonomi daerah menjadi hal yang sangat penting jika ingin menjadikan daerah sebagai penghasil pendapatan asli daerah yang andal.

APBN menyediakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan negara untuk meningkatkan kemampuan keuangannya. Rata-rata dana alokasi yang dicairkan pemerintah daerah selama beberapa tahun terakhir sangat tinggi. Proyek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan DAU. Unit Akuisisi Langsung (DAU) merupakan salah satu sumber pembiayaan yang paling menjanjikan untuk mengalokasikan belanja modal. Mengingat kebutuhan suatu daerah seringkali lebih tinggi daripada kemampuannya untuk memanfaatkannya, DAU dapat digunakan sebagai sarana pembiayaan belanja modal. Pembangunan akan tersebar merata di setiap daerah jika pemerintah menggunakan DAU untuk membangun infrastruktur.

Selain itu, APBN menyalurkan dana kepada daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) agar daerah dapat melaksanakan berbagai inisiatif khusus daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional. Pada tahun 2019, Pemerintah

Kabupaten Lumajang menambah luas wilayah layanannya sebesar 2.576,52 hektare sebagai konsekuensi dari peningkatan infrastruktur. Hasil pertanian di Kabupaten Lumajang akan terdongkrak oleh peningkatan jaringan irigasi. Sebagai contoh, akses ke daerah pedesaan terpencil menjadi tantangan karena minimnya akses ke fasilitas umum di wilayah DAK Kabupaten Lumajang. Tingkat pendidikan di Kabupaten Lumajang masih tergolong rendah karena fasilitas pendidikan yang kurang memadai sehingga tidak mendukung semua sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan masalah ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Pramudya (2021) “Analisis dampak PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal merupakan judul penelitiannya. Tidak berdampak pada belanja modal (PAD), tidak berdampak pada belanja modal (DAU), dan berdampak pada belanja modal (DAK), menurut penelitian”.

Informasi ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) tentang “topik alokasi belanja modal dan pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan DBH berdampak signifikan terhadap belanja modal, dengan DAU mengarah ke arah negatif. Terdapat hubungan yang kuat antara belanja modal dan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH secara bersamaan”.

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas identifikasi masalah yang dicakup sebagian besar hanya mencakup tentang “Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja modal.

Batasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan pada penelitian PAD, DAU, DAK dan belanja modal” dengan memperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalahnya telah ditunjukkan. Oleh karena itu, analisis peneliti terhadap pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah belanja modal dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
- b. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) merugikan modal belanja?
- c. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berlaku untuk belanja modal?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat disusun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi belanja modal.
- b. Untuk memahami bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi belanja modal.
- c. Untuk memahami bagaimana Dana Alokasi Khusus (DAK) mempengaruhi belanja modal.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang pengelolaan keuangan desa dan menyediakan landasan bagi studi-studi selanjutnya. Dengan

membandingkan dan mengontraskan berbagai pendekatan, kita dapat menentukan seberapa baik alokasi anggaran saat ini ditangani.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dalam penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan dana dan sebagai informasi yang diharapkan dapat menyadarkan akan pentingnya mengetahui pengelolaan alokasi dana untuk ikut berpartisipasi didalamnya serta dapat dijadikan juga sebagai referensi pengetahuan program Akuntansi Institut Teknologi Widya Gama Lumajang.

